

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

**INDRA
NIM. 19622243**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

OLEH

**INDRA
NIM. 19622243**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI
PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

Diajukan kepada:

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh:

NAMA : INDRA
NIM : 19622243

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Andres Putranta Sitepu, S.E., M.Ak
NIDK. 8854290019/Asisten Ahli

Hasnarika, S.Si., M.Pd
NIDN. 1020118901/Lektor

Menyetujui,
Ketua Program Studi,

Hendy Satria, S.E., M.Ak
NIDN. 1015069101/Lektor

Skripsi Berjudul

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : INDRA
NIM : 19622243

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Empat Belas Juli Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Sekretaris,

Andres Putranta Sitepu, S.E., M.Ak
NIDK. 8854290019/Asisten Ahli

Hendy Satria, S.E., M.Ak
NIDN. 1015069101/Lektor

Anggota,

Novi Chandra Saputra, S.E., M.Ak
NIDK. 8968410021/Asisten Ahli

Tanjungpinang, 14 Juli 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,

Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Indra
NIM : 19622243
Tahun Angkatan : 2019
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,93
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan
Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan
Pemerintah Kota Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 14 Juli 2023

Penyusun

INDRA
NIM. 19622243

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin

Puji syukur saya ucapkan kepada **Allah SWT** yang selalu memberikan karunia-Nya sehingga saya akhirnya masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini merupakan persembahan saya kepada Keluarga saya terutama **Ibu** saya yang telah mendukung setiap Langkah yang saya ambil salah satunya dengan menyelesaikan Pendidikan saya ini.

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada **diri saya sendiri** yang telah berjuang hingga di titik ini dengan segala macam cobaan dan ujian di dalamnya, kepada diri sendiri yang tetap bertahan meski badai menerjang.

Terimakasih kepada semua keluarga saya yang telah mendukung setiap Langkah saya dan setiap keputusan yang saya ambil.

HALAMAN MOTTO

“Teruslah bermimpi meski kadang merasa mimpi itu terlalu tinggi, pada kenyataannya tidak ada mimpi yang terlalu tinggi hanya saja kita yang terlalu takut untuk merealisasikannya”-Indra

“life is a university of life, learn from what life has given” -Indra

“Teruslah berjuang, karena kita adalah **PERINTIS** bukan **PEWARIS**”
-Indra

"Bukan beban yang menghancurkanmu, tapi caramu membawanya." -
Lou Holtz

“Kehidupan adalah 10 persen apa yang terjadi pada Anda dan 90 persen adalah bagaimana Anda meresponnya.” - Lou Holtz.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Program studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang turut serta membantu mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Muhammad Rizki, S.Psi., M.HSc selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak Andres Putranta Sitepu, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, saran, dan perbaikan terhadap penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Hasnarika, S.Si., M.Pd selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, saran, dan perbaikan terhadap penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh anggota keluarga penulis yang tiada hentinya memberikan dukungan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 dan HIMA Akuntansi 2022/2023 yang terus menemani dan memotivasi penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi, yang tak dapat dituliskan satu-persatu, terimakasih atas semuanya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya Mahasiswa/mahasiswi Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 14 Juli 2023

Penulis

INDRA
NIM 19622243

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN MOTTO

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR..... xiv

DAFTAR LAMPIRAN..... xv

ABSTRAK xvi

A B S T R A C T xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Batasan Masalah..... 7

1.4 Tujuan Penelitian..... 7

1.5 Kegunaan Penelitian..... 8

1.5.1 Kegunaan Ilmiah 8

1.5.2 Kegunaan Praktis..... 8

1.6 Sistematika Penulisan..... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori..... 11

2.1.1 Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah 11

2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintah 15

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan 21

2.2 Hubungan Antar Variabel 24

2.2.1	Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang.....	24
2.2.2	Hubungan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang.....	26
2.3	Kerangka Pemikiran	27
2.4	Hipotesis.....	27
2.5	Penelitian Terdahulu	28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	34
3.2	Jenis Data	35
3.3	Teknik Pengumpulan Data	36
3.4	Populasi dan Sampel	37
3.4.1	Populasi	37
3.4.2	Sampel	39
3.5	Definisi Operasional Variabel	43
3.6	Teknik Pengolahan Data	45
3.7	Teknik Analisis Data.....	46
3.7.1	Uji Kuesioner	47
3.7.2	Analisis Deskriptif.....	49
3.7.3	Uji Asumsi Klasik.....	49
3.7.3.1	Uji Normalitas.....	49
3.7.3.2	Uji Multikolinieritas.....	50
3.7.3.3	Uji Heteroskedastisitas	50
3.7.4	Analisis Regresi Linier Berganda	51
3.7.4.1	Uji t (Parsial)	44
3.7.4.2	Uji f (Simultan)	45
3.7.4.3	Koefisien Determinasi	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian.....	53
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	53
4.2	Analisis Hasil Penelitian.....	55
4.2.1	Uji Kuesioner	55
4.2.2	Analisis Deskriptif.....	59
4.2.3	Uji Asumsi Klasik	60
4.2.4	Analisis Regresi Linier Berganda.....	64
4.3	Pembahasan.....	68
4.3.1	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang.....	69
4.3.2	Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang.....	70
4.3.3	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang.....	71

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	72
5.2	Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1.1	Data Pemberian Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017-2021.....	4
3.1	Daftar Populasi.....	31
3.2	Daftar Sampel.....	35
3.3	Definisi Operasional Variabel.....	37
4.1	Hasil Uji Validitas Variabel Standar Akuntansi Pemerintah.....	49
4.2	Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan.....	50
4.3	Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Keuangan.....	50
4.4	Hasil Uji Reliabilitas Standar Akuntansi Pemerintah.....	51
4.5	Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan.....	52
4.6	Hasil Uji Reliabilitas Akuntabilitas Kinerja Keuangan.....	52
4.7	Hasil Analisis Deskriptif Variabel Standar Akuntansi Pemerintah.....	53
4.8	Hasil Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Laporan Keuangan	53
4.9	Hasil Analisis Deskriptif Variabel Akuntabilitas Kinerja Keuangan.....	54
4.10	Hasil Uji Multikoleniaritas.....	57
4.11	Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	58
4.12	Hasil Pengujian Parsial (Uji t).....	59
4.13	Hasil Pengujian Simultan (Uji F).....	61
4.14	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	62

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran.....	23
4.1	Histogram Uji Normalitas.....	55
4.2	Grafik Normal Q-Q Plot.....	55
4.3	Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
Lampiran 1	: Kuesioner
Lampiran 2	: Tabulasi Hasil Kuesioner
Lampiran 3	: Hasil Pengujian JASP
Lampiran 4	: Dokumentasi Penyerahan Alat Ukur (Kuesioner) Ke Objek Penelitian
Lampiran 5	: Persentase Plagiat
Lampiran 6	: Surat Pernyataan Selesai Penelitian

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

Indra. 19622243. Akuntansi.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Indratan56@gmail.com

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Adapun yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk meneliti didasarkan pada hasil observasi awal yang penulis lakukan dimana Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menerapkan sistem pencatatan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dari tahun 2014 dan telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK selama delapan tahun berturut. Dimana dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik, oleh karena itu penulis ingin mengetahui apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diterapkan serta Kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan ialah data primer, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan skala likert.

Hasil analisis yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah kota tanjungpinang. Dari hasil perhitungan statistik yang dilakukan diperoleh Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh sebesar 74,6% terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang baik akan berpengaruh terhadap peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangannya, begitu juga semakin berkualitas suatu laporan keuangan maka akuntabilitas kinerja keuangannya juga akan semakin baik.

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Dosen Pembimbing I : Andres Putranta Sitepu, SE.,M.Ak

Dosen Pembimbing II : Hasnarika, S.Si.,M.Pd

A B S T R A C T

THE EFFECT OF APPLICATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS AND THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS ON ACCOUNTABILITY OF FINANCIAL PERFORMANCE TANJUNGPINANG CITY GOVERNMENT

Indra. 19622243. Akuntansi.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Indratan56@gmail.com

The purpose of this study was to determine the effect of the application of Government Accounting Standards, and the Quality of Financial Statements on the Financial Performance Accountability of the Government of Tanjungpinang City.

As for the background of the writer's interest in researching, it is based on the results of the initial observations that the writer made where the Government of Tanjungpinang City has implemented an accrual-based government accounting standard recording system from 2014 and has received a Qualified Opinion from BPK for eight consecutive years. Where it can be concluded that the financial reports of the Tanjungpinang City Government can be said to have good quality, therefore the author wants to know whether the application of Government Accounting Standards that have been implemented and the quality of the resulting Financial Reports have an influence on the Financial Performance Accountability of the Tanjungpinang City Government.

The research method used in this study is a quantitative research method. The type of data used is primary data. Data collection techniques are carried out using a questionnaire with a Likert scale.

The results of the analysis used in this study indicate that there is an influence between the application of government accounting standards and the quality of financial reports on accountability for the financial performance of the Tanjungpinang city government. From the results of statistical calculations carried out, it was obtained that Government Accounting Standards and the Quality of Financial Statements had an effect of 74,6% on the Financial Performance Accountability of the Tanjungpinang City Government.

The application of good government accounting standards will affect the increase in accountability for financial performance, as well as the more quality of a financial report, the better the accountability for financial performance.

Keywords : Government Accounting Standards, Quality of Financial Statements, Financial Performance Accountability

Advisor I : Andres Putranta Sitepu, SE.,M.Ak

Advisor II : Hasnarika, S.Si.,M.Pd

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja keuangan yang baik dalam Organisasi Perangkat Daerah menjadi cita-cita bersama transparansi dan akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan menjadi acuan rakyat untuk menilai pertanggungjawaban publik, Negara diuntut untuk transparan dan tanggung jawab sebagai pengelola dana rakyat dalam kegiatan pemerintahan agar dapat tercatat dengan baik untuk dapat merealisasikan cita-cita tersebut pemerintah diuntut untuk dapat mengelola potensi fisik mau pun non fisik yang dimiliki Negara ini, diantaranya ialah keuangan sehingga tingkat keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan Negara selaras dengan tujuan yang di inginkan dan selaras dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah di tetapkan dalam mencapai *good governance*.

Di Indonesia sendiri perkembangan sektor publik semakin pesat, pemerintah sebagai organisasi sektor publik menjadi tiang Negara memiliki tanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyat, menjunjung tinggi cita-cita rakyat, pembangunan berkelanjutan serta keadilan dalam segala aspek kehidupan yang merata terhadap seluruh masyarakat indonesia. Menjalankan aspek manajerial dan fungsional dari pemerintahan yang menjunjung efektifitas dan efisiensi yang dapat berwujud *good governance*. Penjabaran atas tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Laporan keuangan disampaikan kepada

pihak-pihak yang berwenang agar dapat memberikan kontribusi dalam penetapan peraturan yang berkualitas, efektif, dan dapat di percaya.

Pemerintah Indonesia baik pusat dan daerah diuntut menciptakan akuntabilitas sektor publik dalam rangka mewujudkan *good governance*. Tuntutan tersebut merupakan efek dari krisis ekonomi akibat buruknya tata kelola dan birokrasi. Tuntutan tersebut tentunya dapat di capai dengan menyediakan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu, yaitu laporan yang relevan, andal, serta dapat di percaya kebenarannya dimana semua informasi keuangan terekam secara baik di dalamnya, seperti transaksi-transaksi keuangan sebagai bukti pertanggung jawaban pemerintah terhadap penggunaan alokasi dana anggarannya.

Akuntabilitas kinerja keuangan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Laporan keuangan yang telah selesai disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) akan dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan dalam menetapkan keputusan. Adapun elemen laporan keuangan yang disajikan meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang memiliki kualitas baik harus mengandung empat karakteristik kualitatif suatu laporan keuangan, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Dalam menilai suatu laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyampaikan penilaian berupa opini, Terdapat beberapa opini penilaian yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar (TP) atau *adversed opinion*, dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) atau *disclaimer of opinion*.

Laporan keuangan yang berkualitas idealnya harus mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi dan kinerja perusahaan dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD), informasi harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa yang akan datang, semakin tajam gambaran yang disajikan lewat data keuangan, maka semakin mendekati kebenaran menurut Ernawati, 2019 dalam (Ismunawan & Septyani, 2020).

Dalam penelitian (Wiguna et al., 2021) menjelaskan bahwa uji *t coefficient* dapat digunakan untuk menghitung kualitas suatu laporan keuangan apakah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintahan. Percobaan ini dijalankan dengan memanfaatkan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$), dimana jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan jenjang perubahan sebesar $0.000 < 0.05$, maka pernyataan praduga yang ditampilkan dapat diterima. Hal ini menjelaskan bahwa kualitas suatu laporan keuangan berpengaruh signifikan atau positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$,

(Ridzal, 2020) menjelaskan bahwa baik buruknya kualitas suatu laporan keuangan yang disusun akan menggambarkan baik buruknya akuntabilitas kinerja keuangan dari suatu instansi tersebut. Suatu lembaga pemerintah dengan kinerja keuangan yang baik selalu menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta akan menyampaikan laporan keuangan yang bermutu dan berkualitas.

Berdasarkan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepulauan Riau dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*. Data pemberian opini atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Pemberian Opini Pemeriksaan BPK
Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang
Tahun 2017sampai 2021

Judul LHP	Hasil Opini BPK				
	2017	2018	2019	2020	2021
LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPK.Kepri, 2022

Hasil di atas menunjukkan bahwa selama 5 tahun berturut-turut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dimana kualitas informasi keuangan yang disajikan

berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berpegang teguh pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang di terapkan pada Organisasi Perangkat Daerah tersebut.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual di Kota Tanjungpinag sendiri sudah diterapkan sejak tahun 2010 dan telah mendapatkan capain opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 8 kali sejak tahun 2014. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah baik dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang diterapkan.

Akuntansi sektor publik mempunyai peran penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas publik. Untuk dapat menciptakan Akuntabilitas tersebut maka laporan keuangan yang disampaikan juga harus berkualitas (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Dengan diperolehnya opini WTP oleh Kota Tanjungpinang selama 8 tahun berturut menandakan bahwa kualitas laporan keuangan pada Instansi Pemerintah Kota Tanjungpinag sudah baik dan dapat menggambarkan akuntabilitas kinerja keuangannya. Selain itu terdapat beberapa faktor lain juga yang dapat mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Keuangan seperti, Ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Penelitian ini mengarah pada penelitian terdahulu. Dalam penelitian (Wiguna et al., 2021) menjelaskan bahwa kualitas suatu laporan keuangan berdampak terhadap tingkat Akuntabilitas Kinerja Keuangan. Disamping itu

penelitian yang dilakukan (Ridzal, 2020) menjelaskan bahwa kualitas suatu laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan. Kinerja keuangan instansi pemerintah yang membuat laporan keuangan selaras dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) akan memanifestasikan laporan keuangan yang bermutu dan berkualitas.

Berdasarkan kejadian dan persoalan yang telah disajikan, serta beberapa referensi penelitian dahulu, oleh karena itu penelitian ini akan menguji pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Penulis berminat melakukan penelitian yang dengan berjudul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang?
2. Apakah Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang?

3. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini hanya membahas mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Kota Tanjungpinang, dengan objek penelitian ialah Bagian Keuangan Setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tanjungpinang.
2. Objek pada penelitian ini ialah Bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan atau Kepala Sub Bagian Keuangan yang telah bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan di atas, maksud dan tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Kota Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

3. Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Secara ilmiah penelitian ini berguna untuk dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya dan sekaligus menggambarkan sejauh mana pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tanjungpinang. Selain itu penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi seluruh pembaca khususnya tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tanjungpinang.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Adapun beberapa kegunaan praktis yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tanjungpinang Penelitian ini diharapkan dapat memberikan *feedback* yang positif dan dapat memberikan sumbangsih kepada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tanjungpinang sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan agar dapat lebih di tingkatkan kedepannya.

2. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan peneliti dalam bidang akuntansi sektor publik. Terkhusus mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tanjungpinang. Selain itu diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah di dapat selama menempuh perkuliahan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pun wawasan bagi peneliti selanjutnya dalam melaksanakan penelitian terutama dalam bidang akuntansi sektor publik terutama dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah .

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan serta menjabarkan secara rinci permasalahan maupun fenomena yang dimuat kedalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian ini dilakukan, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat landasan teori-teori pendukung serta menjelaskan teori-teori penelitian yang mendukung permasalahan yang akan diteliti atau yang dianalisis, kerangka penelitian dan juga memuat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian guna memperkuat teori terhadap penelitian yang dilakukan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan secara rinci mengenai jenis penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pemaparan hasil atas data penelitian yang dilakukan serta pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan pemerintah merupakan suatu bentuk gambaran tentang kondisi keuangan suatu instansi pada periode akuntansi tertentu baik yang menyangkut aspek penghimpunan dana mau pun penyaluran dana, yang biasanya di ukur dengan indikator kecukupan baik modal, likuiditas, dan juga profitabilitas. Menurut Jumingan dalam jurnal (Herawati, 2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menyebutkan bahwa akuntabilitas yaitu kewajiban dalam mengungkapkan sumber daya yang dikendalikan serta pelaksanaan strategi yang diamanatkan kepada organisasi sektor publik dalam menggapai visi dan misi yang telah diabsahkan secara periodik. Menurut Mahmudi, 2018 dalam jurnal (Wiguna et al., 2021) akuntabilitas publik merupakan keharusan pemegang amanah (*agent*) dalam memberikan pertanggung jawaban, menyusun, menyampaikan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberi kepercayaan (*principal*) yang berhak meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas bukan sekedar pembuatan laporan keuangan semata, tetapi sebagai cara dalam penumpasan korupsi, dan usaha dalam meningkatkan akuntabilitas ialah langkah utama yang di lakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Dwi Afriyanti, Harpanto Guno Sabanu, 2015 dalam jurnal (Ridzal, 2020). Tujuan dan fungsi laporan keuangan organisasi

pemerintahan adalah untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, laporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi sebagai bahan untuk melakukan evaluasi kinerja suatu organisasi sektor publik menurut Mardiasmo, 2005 dalam jurnal (Sujatmiko, 2019).

Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi yang baik dapat menciptakan pelaksanaan kinerja keuangan yang baik pula dimana hal tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menurut Karrika dan Sukanto 2019 dalam jurnal (Fadila & Budiwitjaksono, 2022).

Kinerja keuangan instansi pemerintah terkait dengan realisasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat di kontrol dengan adanya suatu system pelaporan yang baik. Sistem pelaporan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengukur kinerja yang dihasilkan oleh pemerintah selama periode tertentu sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi agar dapat melaksanakan tanggungjawab lebih baik lagi untuk kedepannya. Sistem pelaporan yang tidak baik dapat menyesatkan para pengguna laporan sehingga mengakibatkan suatu pengambilan keputusan yang salah. Sistem pelaporan dapat dikatakan baik jika laporan telah disusun secara jujur, objektif, dan transparan, sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan persyaratan pelaporan keuangan

organisasi sektor publik menurut Kartika dan Sukamto, 2019 dalam jurnal (Fadila & Budiwitjaksono, 2022).

Akuntabilitas kinerja keuangan instansi pemerintah ialah wujud keharusan dalam suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di percayakan para pemegang kepentingan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara terarah dengan sasaran target yang telah di rencanakan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang di susun secara periodik (Ridzal, 2020).

Mahmudi 2015 dalam jurnal (Sujatmiko, 2019) menyatakan bahwa kinerja keuangan suatu organisasi public dapat tercermin dari laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan keuangan tersebut dianalisis guna mendapatkan gambaran kinerja keuangan suatu organisasi atau Lembaga dalam suatu periode tahun anggaran.

Sijabat et al. 2013 dalam jurnal (Polii et al., 2020) akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kinerja keuangan pemerintah merupakan hasil keluaran yang telah atau akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat di ukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menurut Sumarjo, 2010 dalam (Polii et al., 2020).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara merupakan proses menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang berimbang dengan prinsip tepat waktu dan di sampaikan dengan mengacupada Standar Akuntansi Pemerintah yang diterima secara umum. Akuntabilitas merupakan pilar pertanggungjawaban publik dimana proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada legislative dan masyarakat tentunya (Madjid, 2019).

Kinerja keuangan instansi pemerintah dapat disebut juga sebagai hasil dari suatu sistem pengelolaan keuangan mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang meingindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dengan kata lain, setelah suatu sistem pengelolaan keuangan terbentuk perlu disiapkan sutau alat untuk mengukur kinerja keuangan dan mengendalikan pemerintahan agar tidak terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tidak adanya kepastian hukum dan stabilitas politik, dan ketidak jelasan arah dan kebijakan pembangunan.

Pengukuran kinerja keuangan juga memiliki hubungan erat dengan akuntabilitas. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas diperlukan manajemen kinerja keuangan yang didalam terdapat indikator kinerja dan target kinerja. Indikator pengukuran kinerja keuangan yang baik mempunyai karakteristik *relevant*, *unambiguous*, *cost-effective*, dan *simple*, serta fungsi

sebagai sinyal yang menunjukkan bahwa terdapat masalah yang memerlukan Tindakan manajemen dan investigasi lebih lanjut, menurut Sumarsono 2010 dalam (Darma, 2019).

Stewart, 1984 (Ridzal, 2020) menyatakan bahwa ada lima basis akuntabilitas sebagai standar penilaian akuntabilitas, yaitu: Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Kinerja, dan Akuntabilitas Kebijakan.

Pemerintah daerah yang akuntabel dalam pengelolaan keuangannya berarti mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat, mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan, dan pemerintahan serta adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sangat penting dalam tercapainya *good governance* ditingkat pemerintah daerah (Amin & Baehaqi, 2019).

2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintah

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Undang-undang No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dikatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus dapat memenuhi syarat diantaranya karakteristik, relevan, andal, dapat di bandingkan, dan dapat dipahami. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa anggaran ialah patokan dalam melakukan tindakan yang akan dikerjakan pemerintah melalui rencana pendapatan, belanja, transfer, dan

pembiayaan yang dihitung dalam satuan rupiah, yang disajikan menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode (Yaqin & Jatmiko, 2019).

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan pedoman dan prinsip-prinsip akuntansi dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan, diterapkan dilingkungan pemerintah pusat mau pun daerah dan dinas-dinasnya. SAP berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak dilusr instansi (Yanti et al., 2020).

Standar akuntansi pemerintahan digunakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan SAP yang berlaku di Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, dampak peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah akan terletak pada penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah. Dibawah ini terdapat delapan prinsip yang digunakan pada akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah : a) Basis Akuntansi, b) Prinsip nilai perolehan, c) Prinsip Realisasi, d) Prinsip substansi mengungguli formalitas, e) Prinsip periodisitas, f) Prinsip konsistensi, g) Prinsip pengungkapan penuh, h) Prinsip pengajian wajar (Simanjuntak et al., 2023).

Komponen laporan keuangan dalam Draft Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual ada 7 komponen laporan keuangan dimana terdapat penambahan 3 jenis laporan dalam draft SAP berbasis akrual komponen laporan keuangan tersebut ialah :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang di kelola oleh pemerintah pusat atau

daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Relaisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dengan sekurang-kurangnya harus memiliki 4 unsur yaitu Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan (*financing*).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Menyajikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, yang berisikan saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan, anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut di sajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

3. Neraca

Menggambarkan posisi keuangan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu atau biasanya dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan. Dalam neraca, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengklasifikasikan dalam set lancar dan asset tetap, serta mengklasifikasikan kewajibannya kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan – LO, beban, dan surplus atau defisit operasional dari sutau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang penyajiannya di sandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Laporan Arus Kas memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan Negara di perlukan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Berisikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan Negara.

Sistem akuntansi dengan basis akrual ialah akuntansi yang mengakui dan mencatat segala transaksi Ketika terjadi atau saat adanya perolehan. Dapat dikatakan sistem akuntansi yang satu ini berfokus dengan memperhitungkan sumber daya yang ekonomis pada suatu entitas menurut Nasution 2019 dalam

(Wahyuni, 2022). Kelebihan dalam akuntansi basis akrual adalah setiap informasi akuntansi yang didapat akan lebih lengkap ataupun juga sistem ini menyajikan informasi yang jauh lebih lengkap dan terperinci perihal aktiva juga kewajiban. Sistem akuntansi basis akrual dapat memenuhi atau melengkapi tujuan dari laporan yang tidak bisa digunakan oleh sistem akuntansi pemerintah dengan basis kas, menurut Lamonis 2016 dalam (Wahyuni, 2022).

(Wahyuni, 2022) menyebutkan terdapat beberapa manfaat dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dengan basis akrual diantaranya ialah:

- a. Dapat menunjukkan latar belakang yang utuh untuk kedudukan pada keuangan pemerintah.
- b. Laporan disajikan dengan jelas dan sebenarnya mengenai kewajiban dan sangat berguna untuk evaluasi kinerja keuangan mengenai pencapaian tujuan.

Beberapa indikator dalam Sistem Akuntansi Berbasis Akrual ialah : 1) Pencatatan, 2) Pengikhtisaran, 3) Pelaporan.

Tidak hanya manfaatnya saja, namun terdapat beberapa kekurangan atas penerapan akuntansi berbasis akrual, antara lain:

- a. Perlunya kesiapan untuk mengatasi masalah-masalah seperti biaya penilaian asset, biaya penyusunan atas kebijakan akuntansi, biaya pembangunan sistem komputer, dan biaya lainnya. Karena biaya tersebut cukup mahal.
- b. Akuntansi basis akrual kurang memiliki arti bagi pemerintah karena pada dasarnya basis ini digunakan untuk mengukur keuntungan.

- c. Membutuhkan keleluasaan yang lebih besar dalam hal pertimbangan professional.

Karena akuntansi berbasis akrual bersifat kompleks sehingga kurang mendapat perhatian dalam penelaahan sehingga untuk akuntabilitas laporan keuangan berkurang sehingga perlunya pemilihan strategi implementasi berbasis akrual yang dapat dicermati, supaya penerapan dari basis akrual berhasil, menurut Mu'am 2015 dalam jurnal (Rosana & Bharata, 2023).

Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah dengan menggunakan basis akrual. Dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual tercipta laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami sehingga mampu memberikan gambaran lengkap tentang posisi keuangan serta menyajikan fakta yang relevan, andal, dan benar tentang hak dan kewajiban. Informasi dan membantu menilai kinerja keuangan pemerintah, menurut Ikhyannuddin 2022 dalam jurnal (Parinding et al., 2023).

Standar Akuntansi Pemerintah disajikan oleh suatu Komite Standar yang independen dibidangnya kemudian disahkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan setiap organisasi pemerintah harus membuat 7 komponen laporan keuangan sebagai mana yang terdapat dalam Draft Standar Akuntansi Pemerintahan (Fauzi & Hasanah, 2017). Prinsip yang berlaku dalam akuntansi dan pelaporan keuangan yang berlaku pada organisasi pemerintahan di Indonesia: Prinsip Akuntansi, Prinsip Realisasi, Penyajian Wajar (Mardiasmo et al., 2019)

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan adalah proses yang mencakup seluruh aspek yang berkenaan dengan ketersediaan dan pelaporan yang berkualitas tinggi informasi keuangan yang berguna bagi investor, kreditur, dan pengguna lainnya dalam membantu pengambilan keputusan terkait investasi atau lainnya. (Agung, 2020). Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang di wujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat mencapai tujuannya, SAP 2010 dalam jurnal (Wiguna et al., 2021)

Akuntansi sektor publik memiliki peran dalam menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Demi menciptakan akuntabilitas maka laporan keuangan yang di hasilkan harus berkualitas. Laporan yang berkualitas dan bermutu memiliki risiko atau kemungkinan akurat lebih besar di banding laporan keuangan yang di susun tanpa melihat peraturan-peraturan yang berlaku. Kualitas suatu laporan keuangan sangat menunjang suatu Organisasi Perangkat Daerah dalam menuju akuntabilitas kinerja.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurut Puspitawati dan Anggadini, 2011 dalam jurnal (Bramasto et al., 2021) ialah pengelolaan data keuangan entitas dimulai dari dokumen transaksi yang berupa faktur, dokumen, nota, kwitansi, dan bukti-bukti transaksi keuangan yang lainnya sehingga kemudian di catatkan dalam pembukuan suatu organisasi sehingga hasil akhir dari proses pencatatan dan pengidentifikasian dokumen transaksi itu akan menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan.

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu kewajiban mutlak dalam membuat dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menggambarkan ketaatan penggunaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup taat administrasi. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan fakta atau kebenaran yang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), laporan keuangan yang berguna bagi para pemangku dan pihak yang membutuhkan dalam mengukur akuntabilitas kinerja serta keuangan dan membuat kebijakan baik kebijakan ekonomi, sosial, mau pun politik.

Menurut Bastian 2006 dalam jurnal (Suhardjo, 2019) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dapat diukur berdasarkan karakteristik kualitatif diantaranya: dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, kelengkapan dan dapat dibandingkan. Kualitas laporan keuangan mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta menunjukkan laporan keuangan sudah menuju kearah yang benar guna mewujudkan anggaran yang tepat sasaran.

Informasi laporan keuangan pemerintah harus memenuhi memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, (Ridzal, 2020) yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan yakni memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu serta lengkap.

2. Andal

Informasi dari laporan keuangan bebas dari pengertia yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut mempunyai potensi menyesatkan. Informasi dikatakan andal apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut: Penyajian jujur, Dapat diverifikasi, Netral.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat. Alat untuk memfasilitaskan agar laporan keuangan tersebut makin transparan dan

akuntabel yaitu dengan SAP. Dengan menerapkan SAP informasi keuangan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. SAP memiliki kekuatan hukum dalam Upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Kualitas laporan keuangan adalah penyajian laporan keuangan yang memiliki kriteria antara lain; kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern, (Setyowati et al., 2020).

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang

Akuntabilitas kebijakan terkait erat dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Akuntabilitas atas kebijakan yang diterapkan kepada publik. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah harus melanjutkan peningkatan control dan sistem pemantauan mereka melalui pertimbangan sistematis dengan memberikan tugas kepada orang-orang tertentu untuk memastikan *checks and balance*. Pengawasan instansi (Inspektorat Daerah) harus lebih efektif dalam kegiatan pembangunannya termasuk pengendalian dan pemantauan rutin kepada pemerintah daerah. Kualitas pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah daerah (Agung, 2020).

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Oleh sebab itu, laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi sesuai pedoman yang telah ditetapkan yaitu standar akuntansi pemerintah (SAP) dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, mau pun politik (Sholohah et al., 2019).

Kualitas laporan keuangan merupakan suatu pengukuran atau tarif semampu informasi pada laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi syarat kualitatif informasi keuangan yang didasarkan dalam pengungkapan secara penuh dan wajar. Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bersifat sangat penting, sebab dapat memberikan suatu informasi kepada pengguna dalam memenuhi kebutuhannya atas informasi keuangan sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik berdasarkan karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar merupakan bentuk dari tata kelola keuangan pemerintahan yang baik. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala memberikan penilaian berupa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dimana opini tersebut menjadi salah satu indikator penilaian kualitas laporan keuangan (Zebua et al., 2020).

2.2.2 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas

Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang

Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas publik. Akuntabilitas sektor publik akan tercermin dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (2010) Kualitas Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Ridzal, 2020). Dalam hal kebutuhan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan merupakan suatu keharusan bagi pemerintah untuk memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas akan menyajikan informasi akuntansi yang akurat.

Semakin meningkatnya kualitas suatu laporan keuangan maka akan semakin menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja keuangan dari instansi pemerintah. Penyajian laporan keuangan yang berkualitas mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan merupakan syarat terciptanya pelaksanaan pemerintahan yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi unsur-unsur relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

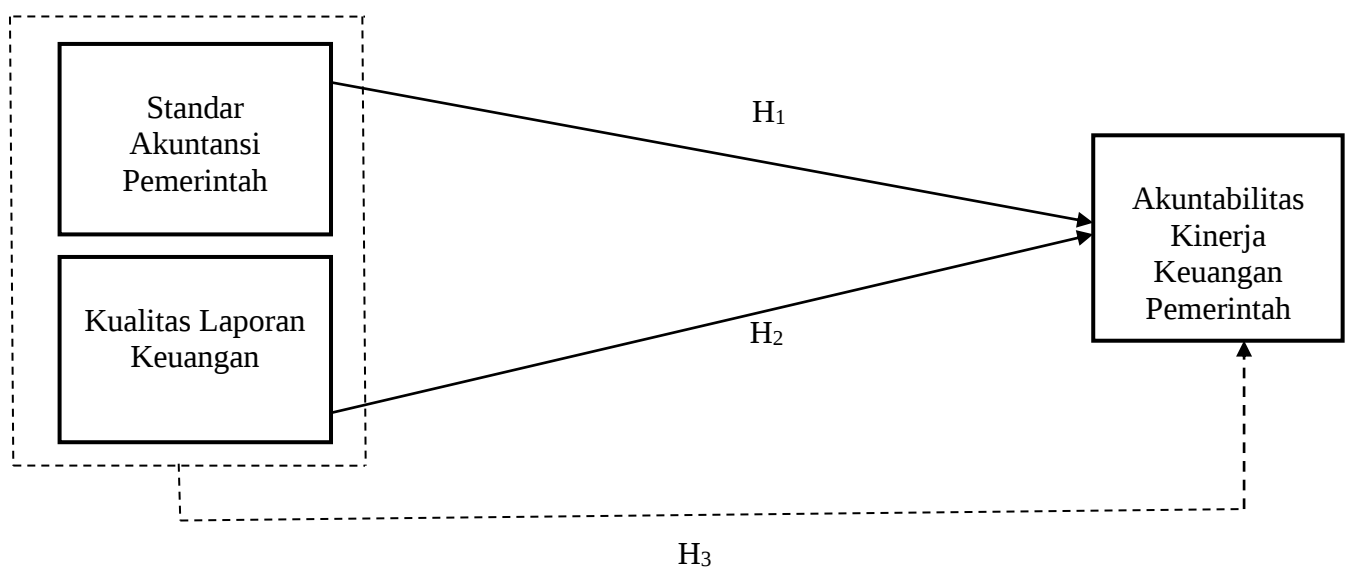
Kualitas laporan keuangan menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja keuangan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Suatu laporan keuangan yang berkualitas harus dapat menunjukkan informasi tentang kinerja dan akuntabilitas kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang

dibutuhkan oleh pemerintah untuk mengambil keputusan guna melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan agar lebih baik dan maksimal (Ridzal, 2020).

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran atau pernyataan mengenai kerangka konsep penyelesaian permasalahan yang dibahas. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti (2023)

———— = Parsial
 - - - - - = Simultan

2.4 Hipotesis

Hipotesis ialah sebuah tebakan yang di kemukakan dan kevalidannya masih dipertanyakan serta perlu di buktikan kenyataannya. Hipotesis juga dilihat

sebagai argumen sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- H₁: Diduga Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah
- H₂: Diduga Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah
- H₃: Diduga Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah.

2.5 Penelitian Terdahulu

1. Dalam penelitian (Ridzal, 2020) dengan judul “Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton”. Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif kuantitatif, dimana variabel X ialah Kualitas Laporan Keuangan dan Variabel Y Akuntabilitas Kinerja Keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang berupa kuesioner dengan sampel sebanyak 35 orang. Teknik pengukuran sampel *non probability sampling* dengan metode sensus. Data dalam penelitian ini diolah menggunakan statistik inferensial dengan model regresi sederhana yang dimulai oleh uji linearitas dan normalitas. Hasil analisis data menggambarkan bahwa nilai signifikansi yang didapat sebesar $0,000 < \alpha$ sama dengan 0.05 maka dapat diartikan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton. Hal ini berarti bahwa baik buruknya akuntabilitas kinerja keuangan dari suatu instansi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan yang disajikan. Jika akuntabilitas pemerintah menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah laporan keuangan yang disajikan akan berkualitas.

2. Dalam penelitian (Wiguna et al., 2021) dengan judul “Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pada Kantor Pengadilan Agama Lubuk Linggau” penelitian ini menggunakan rancangan kuantitatif deskriptif, dimana variabel X ialah Kualitas Laporan Keuangan dan variabel Y yaitu Akuntabilitas Kinerja Keuangan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disampaikan langsung kepada 35 responden pada Kantor Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nilai t_{hitung} variabel kualitas laporan keuangan sebesar 15,517 lebih besar dari t_{tabel} 1.692 dengan nilai signifikansi dengan $0,000 < 0,05$ dan koefisien determinan 0,749 atau 74,9 dimana dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pada Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan sesuai dengan interval koefisien yaitu 0,60 – 0,79 yang masuk dalam kategori kuat.

3. Dalam penelitian (Firiyani & Herawati, 2019) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah) penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dimana variabel X_1 Akuntansi Berbasis Akrua, X_2 Sistem Pengendalian Intern, X_3 Kualitas Laporan Keuangan dan Y Akuntabilitas Kinerja Keuangan. Sampel dalam penelitian ini ialah 30 orang pekerja di Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah. Teknik pengukuran sampel menggunakan metode *Non Probability Sampling* dengan *Proposive Sampling*. Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini didapatkan nilai F_{hitung} sebesar 0,742 sedangkan F_{tabel} sebesar 0,361, karena nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($0,742 > 0,361$) maka dapat di tarik kesimpulan bahwa ada pengaruh signifikan dari kesemua variabel bebas (Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan) terhadap variabel terikat (Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pemerintah) atau dengan kata lain Variabel X_1 , X_2, X_3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y . Dengan diterapkannya Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern, dan Kualitas Laporan Keuangan oleh Pemerintah dan independen akan mewujudkan informasi keuangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik di Pemerintah Bengkulu Tengah dan pelaporan Akuntabilitasnya secara

transparan berdasarkan apa yang terjadi sebenarnya, tidak hanya sekedar laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah.

4. Dalam penelitian (Widodo et al., 2019) dengan judul “*The Antecedent Of Regional Financial Report Quality*” penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dimana variabel X_1 Kompetensi X_2 Pemahaman Terhadap Standar Akuntansi Pemerintah dan X_3 Penerapan Sistem Pengendalian Internal dan Y Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian ini menggunakan 102 kuesioner yang dikumpulkan dengan metode survei, berdasarkan hasil analisis statistic menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan ($U_{ji} = \alpha 4,240$; $= 0,000$) karena nilai $\alpha < 0,005$ maka dapat di simpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi maka semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Berdasarkan hasil analisis ($U_{ji} = 2,456$; nilai $= 0,016$) hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan hasil analisis ($U_{ji} = 2,505$; $\alpha = 0,014$) karena nilai $\alpha < 0,005$ maka dapat di simpulkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan,
5. Dalam penelitian (Agung, 2020) dengan judul “*The Effect Of Financial Reporting Quality On Accountability Of Local Government Performance*”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan verifikatif dimana hipotesis di analisis dan diuji dengan menggunakan metode Structural Equation Model (SEM) dengan subjek penelitian 40 Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) pada kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan variabel X Kualitas Pelaporan Keuangan dan Y Akuntabilitas Kinerja pemerintah Daerah, berdasarkan hasil uji t sebesar $403,418 > t$ dari 3,04 yang berarti pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berpengaruh signifikan dengan tekad koefisien sebesar 88,8%.

6. Dalam penelitian (Supraja, 2019) dengan judul “Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.” Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan variable X1 Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan X2 Efektivitas Fungsi Pengawasan, dan Y Kinerja Keuangan. Dalam penelitian ini diperoleh nilai $R^2 = 0,406$ yang berarti besarnya pengaruh Implementasi SAP Berbasis Akrual dan Efektivitas Fungsi Pengawasan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah sebesar 40,6%.
7. Dalam penelitian (Firiyani & Herawati, 2019) dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Intern, dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah).” Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan variabel independen X1 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, X2 Sistem Pengendalian Intern,

X3 Kualitas Laporan Keuangan dengan variabel dependen Y Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis didapatkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern, dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah pada Inspektorat Bengkulu Tengah, dengan nilai pengaruh sebesar 82% dan sisanya 18% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel X penelitian ini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang memandang realitas atau gejala ataupun fenomena itu dapat di klasifikasikan, relative tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Proses penelitian bersifat deduktif, dimana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan pada sampel yang diambil secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat di generalisasikan pada populasi dimana sampel tersebut di ambil (Sugiyono, 2019).

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode kuantitatif digunakan apabila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas, dan peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi (Sugiyono, 2019).

Penelitian kuantitatif juga mencoba untuk memecahkan dan membatasi fenomena menjadi terukur. Dalam penelitian ini metode penelitiannya menggunakan pengukuran yang terstandar atau menggunakan skala pengukuran data atau skala likert. Sehingga secara esensial penelitian kuantitatif adalah penelitian mengenai pengumpulan data-data numerik yang digunakan untuk menjelaskan fenomena tertentu. Data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif atau

dapat dikuantitatifkan dengan menghitung atau mengukur. Sehingga data kuantitatif lebih banyak berupa angka bukan kata-kata atau gambar. Sehingga data penelitian kuantitatif dapat berupa skala ordinal, nominal, interval ataupun rasio (Danar Paramita et al., 2021).

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer, berupa kuesioner atau angket. Data primer merupakan data yang diperoleh dari survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original (Danar Paramita et al., 2021). Data kemudian di peroleh dengan menyebarkan angket atau kuesioner kepada responden yang berkerja pada Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat di Kota Tanjungpinang. Responden yang mengisi angket diharapkan dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang dirasakan.

Adapun kualifikasi bagi responden dalam mengisi angket yang di bagikan yaitu: merupakan bagian dari staf keuangan atau bidang keuangan, yaitu Bendahara Umum, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, serta Tim Pembantu Bendahara. Responden yang mengisi angket sekurang-kurangnya memiliki pengalaman bekerja minimal 1 tahun ditempat yang sama ketika angket ini di sebarkan. Guna mendapatkan data yang akurat dan relevan perlu adanya persyaratan dalam pengisian angket, semakin berpengalaman responden dalam suatu pekerjaan maka jawaban responden tersebut akan semakin akurat dalam mengisi kuesioner yang di bagikan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diaplikasikan dalam penelitian ini ialah teknik observasi dan teknik kuesioner atau angket. Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan atau kalau perlu dengan pengecapan. Instrument observasi yang berupa pedoman pengamatan, biasa digunakan dalam observasi sistematis dimana observasi bekerja sesuai dengan pedoman yang telah dibuat (Siyoto & Sodik, 2015).

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Hadi, 1986). Observasi dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kota Tanjungpinang.

Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok untuk responden yang jumlahnya cukup besar dan tersebar diwilayah yang luas. Kuesioner dapat

berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet (Sugiyono, 2019). Kuesioner di tujukan kepada Bendahara dan bagian Keuangan pada Organisasi Perangkat daerah yang ada di Kota Tanjungpinang.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan sebanyak 99 responden dengan 33 Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tanjungpinang, terdiri dari 18 Dinas, 6 Badan, 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 1 Rumah Sakit Daerah, serta 4 Kecamatan. Berikut daftar OPD di Kota Tanjungpinang:

Tabel 3.1
Daftar Populasi

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Responden
1.	Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	3 Orang
2.	Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang	3 Orang
3.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang	3 Orang
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Tanjungpinang	3 Orang
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang	3 Orang

6.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang	3 Orang
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang	3 Orang
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang	3 Orang
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang	3 Orang
10.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang	3 Orang
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang	3 Orang
12.	Dinas Sosial Kota Tanjungpinang	3 Orang
13.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang	3 Orang
14.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang	3 Orang
15.	Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang	3 Orang
16.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungpinang	3 Orang
17.	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang	3 Orang
18.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang	3 Orang
19.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang	3 Orang
20.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang	3 Orang
21.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota	3 Orang

	Tanjungpinang	
22.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang	3 Orang
23.	Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	3 Orang
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjungpinang	3 Orang
25.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang	3 Orang
26.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang	3 Orang
27.	Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang	3 Orang
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang	3 Orang
29.	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang	3 Orang
30.	Kecamatan Tanjungpinang Kota	3 Orang
31.	Kecamatan Tanjungpinang Barat	3 Orang
32.	Kecamatan Bukit Bestari	3 Orang
33.	Kecamatan Tanjungpinang Timur	3 Orang

Sumber: Olahan Data Penulis, 2023

3.4.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi dalam jumlah yang besar, dan tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari

populasi (Sugiyono, 2019). Sampel yang baik merupakan sampel yang dapat mewakili karakteristik populasinya yang ditunjukkan oleh tingkat akurasi dan presisinya.

Teknik Sampling merupakan proses yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam observasi atau penelitian agar dapat menarik suatu kesimpulan atas seluruh populasi penelitian. Besarnya sampel yang digunakan salah satunya di pengaruhi oleh tujuan penelitian. Ketepatan dalam menentukan besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian sangat mempengaruhi kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian (Danar Paramita et al., 2021). Untuk mempersempit ruang lingkup objek penelitian, keterbatasan waktu serta tenaga maka peneliti memilih mengambil sampel pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang berjumlah 24 OPD, alasan pengambilan sampel pada Dinas dan Badan ialah anggaran yang dialokasikan untuk badan dan dinas lebih banyak dibanding instansi lainnya, dengan banyaknya jumlah dinas serta badan yaitu berjumlah 24 OPD dan dianggap telah mewakili OPD lainnya, serta pemilihan Dinas dan Badan dilakukan karena instansi tersebut merupakan satuan kerja pemerintah yang memiliki kepentingan dalam Menyusun, menggunakan, mengawasi, melaporkan keuangan, serta pertanggungjawaban anggaran atau sebagai pelaksana pengelola keuangan pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *nonprobability sampling* dengan menggunakan metode *purposive sampling* yakni metode penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019).

Selain itu besaran sampel yang digunakan menggunakan perhitungan dengan rumus Slovin, menurut (Sugiyono, 2017) rumus slovin adalah suatu rumus yang digunakan untuk mencari besaran sampel yang dinilai mampu mewakili keseluruhan populasi.

Perhitungan penetapan jumlah sampel dengan rumus slovin dimaksud adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+(N.(e)^2)}$$

Dimana:

n = Sampel

N = Populasi

e = Standar Error

dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{99}{1+99.(10\%)^2}$$

$$= 99/1,99$$

$$= 49,75 \text{ Sampel} = 50 \text{ Sampel}$$

Berdasarkan perhitungan rumus slovin diatas, Maka diperoleh jumlah responden pada penelitian ini adalah sebanyak 50 respoden, dengan 24 OPD di Kota Tanjungpinang yang menjadi responden di setiap OPD nya. Dimana pada Dinas PUPR dan BPKAD Kota Tanjungpinang terdapat tiga responden. Berikut daftar sampel pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tanjungpinang:

Tabel 3.2
Daftar Sampel

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Responden
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang	2 Orang
2.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Tanjungpinang	2 Orang
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang	3 Orang
4.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang	2 Orang
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang	2 Orang
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang	2 Orang
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang	2 Orang
8.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang	2 Orang
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang	2 Orang
10.	Dinas Sosial Kota Tanjungpinang	2 Orang
11.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang	2 Orang
12.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang	2 Orang
13.	Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang	2 Orang
14.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungpinang	2 Orang
15.	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang	2 Orang
16.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang	2 Orang
17.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang	2 Orang
18.	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang	2 Orang

19.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Tanjungpinang	2 Orang
20.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang	3 Orang
21.	Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	2 Orang
22.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjungpinang	2 Orang
23.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang	2 Orang
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang	2 Orang

Sumber: Olahan Data Penulis, 2023

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah menjelaskan bagaimana sebuah variabel akan dioperasionalkan atau diketahui nilainya pada penelitian. Operasional variabel yang digunakan harus selaras dengan konseptual yang dijelaskan sebelumnya. Pengoperasionalan variabel ini juga berhubungan dengan proksi yang digunakan oleh peneliti didalam penelitian. Variabel penelitian juga harus dilakukan penentuan skala penelitian. Skala penelitian selain untuk menjelaskan bagaimana variabel penelitian terukur juga akan menentukan secara tepat alat uji statistik yang akan digunakan (Danar Paramita et al., 2021). Berikut variabel-variabel yang digunakan dalam laporan ini:

Tabel 3.4
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator	No. Pertanyaan	Skala
1.	Standar Akuntansi	Standar Akuntansi	Prinsip yang berlaku		Likert

	Pemerintah (SAP)	Pemerintah adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan (Yuesti et al., 2020)	dalam akuntansi dan pelaporan keuangan: - Prinsip Akuntansi, - Prinsip Realisasi, - Penyajian Wajar (Mardiasmo et al., 2019)	1,2 3,4 5,6	
2.	Kualitas Laporan Keuangan	Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang di wujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat mencapai tujuannya. SAP, 2010 dalam jurnal (Wiguna et al., 2021).	Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah; - Relevan - Andal - Dapat dibandingkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Ridzal, 2020).	1,2 3,4 5,6	Likert
3.	Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Kinerja keuangan pemerintah merupakan suatu bentuk	Prinsip Akuntabilitas sebagai Standar Penilaian		Likert

		gambaran tentang kondisi keuangan suatu instansi pada periode akuntansi tertentu baik yang menyangkut aspek penghimpunan dana mau pun penyaluran dana, yang biasanya di ukur dengan indikator kecukupan baik modal, likuiditas, dan juga profitabilitas. Menurut Jumingan dalam jurnal (Herawati, 2019).	Akuntabilitas: - Akuntabilitas hukum dan kejujuran, - Akuntabilitas Proses, - Akuntabilitas Kinerja, - Akuntabilitas Kebijakan. Stewart,1984 (Ridzal, 2020).	1,2 3,4 5,6 7,8	
--	--	--	---	------------------------------	--

Sumber: Olahan Data Penulis, 2023

3.6 Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini teknik pengolahan data menggunakan aplikasi JASP versi 0.17.2.1 merupakan singkatan dari “*Jefferey’s Amazing Statistics Program*” aplikasi olah data statistik yang cukup mampu untuk menyelesaikan permasalahan terkait meta analisa, maupun SEM (*Structural Equation Modeling*).

Adapun alasan penggunaan *Jefferey’s Amazing Statistics Program* atau JASP pada penelitian ini, adalah sebagai berikut (Goss-Sampson, 2019) :

1. JASP ialah Aplikasi yang terus berkembang dan responsif terhadap permintaan, serta terintegrasi dengan *Open Science Framework (OSF)*.

2. JASP adalah aplikasi analisis yang memungkinkan untuk digunakan pada semua skala data, dengan kelebihan terdapat berbagai uji didalamnya dan ukuran sampelnya tidak harus besar atau banyak. Besarnya sampel direkomendasikan berkisar dari 30 s/d 100 kasus,
3. JASP bersifat “*Free, Friendly, and Flexibel*” dimana dapat secara gratis di unduh dan aplikasikan pada jenis komputer apa pun, fitur yang mudah di pahami, serta hasil yang akurat sesuai dengan standar APA (*American Psychological Association*).
4. Data dan keluaran hasil analisis JASP berada di satu file yang sama sehingga memudahkan ketika perlu melakukan analisis ulang.
5. JASP mengolah model refleksitas dan formatif, bahkan konstruk dengan item (indikator) tunggal konstruk reflektif menginterpretasikan bahwa konstruk atau variabel laten mempengaruhi indikator (arah hubungan kausalitas dari konstruk ke indikator).

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis dengan bantuan aplikasi “*Jefferey’s Amazing Statistics Program*”. Model dalam JASP terdiri atas Uji Kuesioner, Analisis Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Regresi Linier Berganda.

3.7.1 Uji Kuesioner

Uji Kuesioner berguna untuk menguji setiap butir pertanyaan yang diberikan kepada responden. Untuk melihat apakah pertanyaan tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Berikut uji yang dilakukan pada Uji Kuesioner:

3.7.1.1 Uji Validitas

Hasil penelitian yang valid terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrument yang valid merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid (Sugiyono, 2019).

Valid atau tidaknya suatu alat ukur tergantung kemampuan alat tersebut untuk mengukur objek yang diukur dengan cermat dan tepat (Wiguna et al., 2021), untuk menguji serta mengukur validitas menggunakan analisis faktor dengan cara mengkorelasi jumlah skor faktor dengan skor total. Jika korelasi setiap faktor positif dan besarnya 0,3 keatas atau $\geq 0,3$ maka faktor tersebut valid (Sugiyono, 2019). Alternatif ketentuan validitas suatu pernyataan pada kuesioner juga dapat dibandingkan dengan nilai r tabel. Untuk menentukan nilai r tabel terlebih dahulu dihitung nilai derajat bebas (*degree of freedom*) dengan rumus $n-2$, dimana menyatakan banyaknya responden untuk uji validitas.

3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas ialah konsistensi sebuah hasil penelitian dengan menggunakan berbagai metode penelitian dalam kondisi (tempat dan waktu) yang berbeda. Secara khusus konsep reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil *score* pada item-item yang terdapat pada kuesioner sehingga uji reliabilitas sesungguhnya menguji ketepatan skala-skala pengukuran instrument penelitian (Budiastuti & Bandur, 2018).

Reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan berulang menghasilkan hasil yang relatif sama, pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Untuk mengukur konsisten pengaruh tidaknya variabel X dengan variabel Y, sebelum dilakukannya pengujian reliabilitas harus ada dasar pengambilan keputusan yaitu *alpha* sebesar 0,60. Variabel yang di anggap reliabel jika nilai variabel tersebut lebih besar dari 0,60 jika lebih kecil maka variabel yang di teliti tidak dapat dikatakan reliabel karena $< 0,60$ (Wiguna et al., 2021).

Uji reliabilitas dalam *Jefferey's Amazing Statistics Program* atau JASP dapat di ukur dengan menggunakan uji statistic *Cronbach's alpha*. *Cronbach's alpha* menghitung batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk. Suatu instrument dinyatakan reliabel artinya instrument tersebut dapat di percaya dan dapat diandalkan. Suatu instrumen dinyatakann reliabel apabila nilai dari *Cronbach's alpha* (α) $> 0,60$.

3.7.2 Analisis Deskriptif

Teknik Analisis Deskriptif adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, menampilkan seluruh data malah mejadi sulit untuk divisualisasikan atau digambarkan oleh pembaca, analisis deskriptif merupakan cara rigkas untuk menggambarkan dan menyimpulkan data namun tidak untuk menguji hipotesa (Goss-Sampson, 2019).

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi linier berganda. Dilakukannya pengujian ini untuk dapat memberikan kepastian agar koefisien regresi tidak bias serta konsisten dan memiliki ketepatan dalam estimasi. Uji asumsi klasik dilakukan untuk menunjukkan bahwa pengujian yang dilakukan telah lolos dari linieritas, normalitas data, multikolonieritas, dan heteroskedastisitas sehingga pengujian dapat dilakukan ke analisis regresi linier. Dalam uji asumsi klasik terdapat beberapa pengujian sebagai berikut:

3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal, model regresi yang baik memiliki distribusi data normal (Ghozali, 2018). Uji normalitas dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain secara visual (histogram residual), maupun dengan cara

statistik menggunakan Kolmogorov Smirnooff, Saphiro Wilks, atau Skewness dan Kurtosis. Dengan histogram residual data dapat dikatakan normal apabila titik garis tertumpu pada central tendensi atau membentuk lonceng (Goss-Sampson, 2019). Selain itu sebaran data juga dapat dilihat melalui grafik Q-Plot dimana jika butiran data tersebar mendekati garis diagonal dan tidak berpola maka data bersifat normal.

3.7.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolonearitas merupakan alat uji model regresi untuk menemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolonearitas dapat dilakukan dengan uji regresi, dengan nilai patokan VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai tolerance (Perdana K, 2016).

Menurut (Perdana K, 2016), terdapat kriteria yang digunakan dalam mengukur uji multikolonearitas sebagai berikut:

1. Jika nilai VIF disekitar angka 1-10, maka dikatakan tidak terdapat masalah dalam multikolonearitas.
2. Jika nilai tolerance $\geq 0,10$ maka dikatakan tidak terdapat masalah dalam multikolonearitas.

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2018). Uji heteroskedastisitas dilihat dengan sebaran data atau

plot yang menyebar menjauhi garis tidak berkumpul atau tertumpu pada satu titik yang berarti bahwa tidak ada pelanggaran heteroskedastisitas.

3.7.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. (Ghozali, 2018). Analisis regresi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Apabila hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka regresi tersebut dinamakan regresi linier sederhana. Dan sebaliknya jika terdapat lebih dari satu variabel terikat dan variabel bebas maka disebut regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda dilihat melalui persamaan : $Y = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \varepsilon$

Berikut uji yang dilakukan pada analisis regresi linier berganda:

3.7.4.1 Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikansi uji $t < 0,05$ maka disimpulkan bahwa secara individual variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Langkah untuk uji t adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan hipotesis yang akan diuji. Hipotesis yang akan diuji yaitu:

$H_0 : \beta_i = 0$, artinya variabel bebas tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel terikat.

$H_1 : \beta_i \neq 0$, artinya variabel bebas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel terikat.

2. Menentukan tingkat signifikansi = α sebesar 0,05.
3. Menentukan daerah keputusan:
 - a. Apabila $t_{sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial variabel X berpengaruh terhadap variabel Y.
 - b. Apabila $t_{sig} > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya secara parsial variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

3.7.4.2 Uji Kelayakan Model (Uji F/Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui variabel independent secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Untuk melihat tingkat pengaruh antara variabel independent dan dependen dengan melihat $F_{hitung} > F_{tabel}$, Uji F juga dapat digunakan untuk melihat apakah model regresi yang ada layak atau tidak, layak artinya model regresi yang ada dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen pada variabel dependen melalui tabel ANOVA, model regresi dinyatakan layak apabila nilai $F_{hitung}(Sig.) < 0,05$.

3.7.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Ghozali, 2018), uji koefisien determinasi (R^2) adalah untuk mengukur seberapa jauh model dapat menerangkan variasi dari variabel yang independen. Nilai yang dipakai dalam sebuah koefisien determinasi adalah seberapa besar nol hingga satu. Jika nilai R^2 yang kecil artinya kemampuan dari variasi variabel independen dalam menjalankan semua variasi variabel sangatlah

terbatas. Oleh sebab itu, jika nilai koefisien mendekati satu, maka variabel independen memberikan informasi yang mendekati sempurna dimana informasi tersebut adalah yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. (2020). The Effect of Financial Reporting Quality on Regional Governments' Performance Accountability. *KnE Social Sciences*, 2020(2007), 694–701. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i6.6636>
- Amin, M., & Baehaqi. (2019). *PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR*. 2(04), 61–65. <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.06.976126v1>
- Bramasto, A., Anggadini, S. D., & Aulia, S. (2021). *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Dampak Dari Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*. 12, 165–178. <https://doi.org/2656-6648>
- Budiastuti, D., & Bandur, A. (2018). Validitas dan Reabilitas Penelitian. In *Binus* (1st ed.). Mitra Wacana Media. www.mitrawacanamedia.com
- Daniar Paramita, R. W., Rizal, N., & Bahtiar Sulistyan, R. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (M. Mursyid & A. Zyan el Mazwa (eds.); 3rd ed., Issue April). WIDYA GAMA press.
- Darma, N. D. A. (2019). ANALISIS PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Fadila, S. N., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 1(Ppsp), 231–237.
- Fauzi, A., & Hasanah, N. (2017). *Akuntansi pemerintahan*. IN MEDIA.
- Firiyani, N., & Herawati, H. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah). *Jurnal Akuntansi Unihaz-JAZ*, 1(17), 19–35. <https://doi.org/2620-8555>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*.
- Goss-Sampson, M. A. (2019). *Analisis Statistik Menggunakan JASP: Buku Panduan Untuk Mahasiswa* (S. Bagaskara, S. Z. Akmal, A. Triman, N. Grasiawaty, & E. Nurhayati (eds.); 2nd ed.). CC BY 4.0. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9980744>
- Hadi, S. (1986). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); 1st ed.).
- Herawati, H. (2019). Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan. *Akuntansi Unihaz - JAZ*, 2(1), 16–25.
- Ismunawan, & Septyani, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 5(3), 107–121. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.3.17-34>
- Madjid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. In *Yogyakarta* (Issue 25). http://www.academia.edu/download/54793453/AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK_Dana_Umum_Genera.docx

- Mardiasmo, Loho, S., & Simanjuntak, B. (2019). *Komite Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Parinding, S., Sari, N., & Dasila, R. A. (2023). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd Kota Palopo. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(1), 97–111. <https://doi.org/10.30813/jab.v16i1.4198>
- Perdana K, E. (2016). Olah Data Skripsi Dengan SPSS 22. In Chriatianingrum (Ed.), *Lab Kom Manajemen Fe Ubb* (1st ed.). LAB KOM MANAJEMEN FE UBB.
- Polii, I. R. A., Saerang, D. P. E., Tangkuman, S. J., Polii, I. R. A., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value for Money. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 781–788.
- Ridzal, N. A. (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Buton. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 87–97. <https://doi.org/10.37403/financial.v6i1.135>
- Riyani, A. A., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2), 477–486.
- Rosana, L., & Bharata, R. W. (2023). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnalku*, 3(1), 23–34. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i1.366>
- Setyowati, L., Wikan, I., & Pratiwi, R. D. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 20(1), 179–191. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1975>
- Sholohah, S. A., Sulistyawati, A. I., & Santoso, A. (2019). Kualitas laporan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Indonesia Accounting Journal*, 1(2), 45. <https://doi.org/10.32400/iaj.26622>
- Simanjuntak, J. M., Sriwiyanti, E., & Tarigan, W. J. (2023). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar. 5(1), 80–110. <https://doi.org/DOI:10.36985/jia.v5i1.662>
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.); 1st ed.). Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (D. I. Sutopo. S.Pd (ed.); 2nd ed.). Alfabeta, CV.
- Suhardjo, Y. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Kota Semarang) Yohanes. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 17(1), 1–13. <https://doi.org/1412-5331>
- Sujatmiko, W. (2019). Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dan Pemberian Opini Atas Laporan Keuangan Audited (Studi Kasus Pada Kementerian Di Indonesia) Sujatmiko. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 5(Mi),

41–52.

- Supraja, G. (2019). ... standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan efektivitas Fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten deli serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 10(1), 115–130. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/577>
- Wahyuni, A. S. dan A. (2022). Analisis Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Kinerja Sdm Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 7(2), 59–66.
- Widodo, S., Wiardi, A. H., & Prabowo, T. D. (2019). Antecedents Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Widodo, Slamet. Wiardi, Akram Harmoni. Prabowo, Tri Deni*, 04, 38–47.
- Wiguna, K. Y., Syafitri, A., & Putri, R. M. (2021). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Pengadilan Agama Lubuklinggau. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(4), 106–125. <https://doi.org/10.47747/jismab.v2i4.509>
- Yanti, N. S., Made, A., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4455>
- Yaqin, A., & Jatmiko, B. (2019). Kontribusi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah : Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Biak Numfor. 2(1), 1–10.
- Yuesti, A., Sandrya Dewi, N. L. P., & Asri Pramesti, I. G. A. (2020). Akuntansi Sektor Publik. In C. N. Aletheia (Ed.), *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* (Pertama, Vol. 17). CV. Noah Aletheia.
- Zebua, J., Rasuli, M., & Oktari, V. (2020). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Pada OPD Pemerintah Kota Pekanbaru. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 1(1), 169–182. <https://doi.org/https://doi.org/10.31258/jc.1.2.170-183>